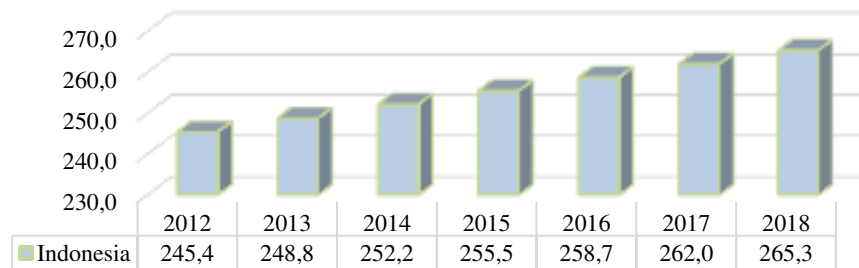


BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam menjadi bagian dari keseluruhan ajaran Islam yang salah satunya memberikan jaminan terwujudnya kesejahteraan. Kesejahteraan dalam pandangan ekonomi Islam tidak hanya permasalahan distribusi ekonomi secara material melainkan terdapat aspek spiritual (Purwana, 2014). Selain itu kesejahteraan biasanya berhubungan dengan permasalahan kemiskinan dan pengangguran dalam menilai keberhasilan pembangunan di suatu negara. Adapun kesejahteraan menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya 'Ulum Al-Din* yaitu tercapainya kemaslahatan yang akan terwujud apabila terpeliharanya tujuan *syara'* (*Maqashid al-Shari'ah*) (Karim, 2014).



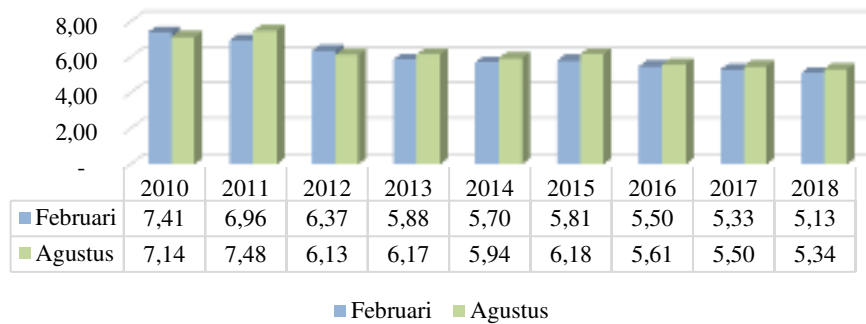
Gambar 1.1 Populasi Negara Indonesia Tahun 2012 – 2018 (Juta jiwa)

Sumber: ISDB Data (2019)

Perkembangan populasi atau jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Gambar 1.1 pada tahun 2012 hingga 2018 pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dari rata-rata pertumbuhan pada setiap tahunnya di Indonesia sebesar 1,3 persen yakni mencapai 265 juta jiwa pada tahun 2018 terakhir. Di sisi lain, populasi Indonesia di masa depan menurut proyeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memiliki penduduk lebih dari 290 juta jiwa pada tahun 2045 mendatang.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 1 menyebutkan bahwa pemuda adalah penduduk berusia 16 hingga 30 tahun yang termasuk usia produktif. Indonesia saat ini sedang menikmati masa bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari usia tidak produktif, yakni pada tahun 2018 jumlah penduduk yang berusia 16-30 tahun sebanyak 63,82 juta jiwa atau sebesar 24,15 persen terhadap total populasi yang mengisi hampir seperempat penduduk Indonesia (BPS, 2018). Adanya potensi penduduk berusia produktif yang besar dan berkualitas serta memiliki kapasitas dalam skala ekonomi dapat berperan positif dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Secara umum permasalahan dalam pembangunan ekonomi tidak lepas dari empat isu besar yaitu kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran dan inflasi. Kemiskinan menjadi isu utama yang akan berdampak pada permasalahan ekonomi pembangunan lainnya antara lain pengangguran (Syamsuri, 2018:98). Pengangguran di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dipandang sebagai indikator ketenagakerjaan dimana penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Adapun istilah Pengangguran Terbuka merupakan pengangguran yang tercipta sebagai akibat dari pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga yang apabila dalam jangka cukup panjang mereka tidak melakukan sesuatu pekerjaan, maka mereka akan menganggur secara nyata dan sepenuh waktu (Sukirno, 2013:330). Oleh karena itu, pengangguran merupakan salah satu masalah makroekonomi yang krusial dan akan berdampak pada tingkat kemakmuran suatu negara.



Gambar 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia Tahun 2010-2018 (Persentase)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Di samping itu dalam konteks Indonesia saat ini masih dihadapkan pada persoalan pengangguran sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2. Berdasarkan data BPS (2019) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 berada pada angka 5,01 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia yang menurun jika dibandingkan pada Februari 2018 yakni 5,13 persen. Meski demikian, angka pengangguran terbuka di kota masih lebih tinggi yakni sebesar 6,3 persen dibanding di desa yakni 3,45 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,01 persen ini menunjukkan kualitas penyerapan lapangan kerja yang baik, karena penurunan angka pengangguran ini terjadi di tengah tingkat partisipasi angkatan kerja yang juga meningkat (BPS, 2019).

Di sisi lain, tingkat partisipasi angkatan kerja menurut BPS pada Februari 2019 sebanyak 136,18 juta orang atau tumbuh 1,67 persen dibanding tahun sebelumnya. Adanya penurunan angka TPT pada tahun 2019 salah satunya disebabkan oleh penciptaan lapangan kerja baru sekitar 9,4 juta berdasarkan nilai kumulatif pada tahun 2015 – 2018 silam. Namun demikian, angka TPT sebesar 5,01 persen masih berada di atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pada tahun 2019-2024 artinya Tingkat Pengangguran Terbuka seharusnya berkisar 4,0 – 4,6 persen (Bappenas, 2019).

Tabel 1.1 Pengangguran Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2015-2018

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2015	2016	2017	2018
1	Tidak/belum pernah sekolah	55.554	59.346	62.984	31.774
2	Tidak/belum tamat SD	371.542	384.069	404.435	326.962
3	SD	1.004.961	1.035.731	904.561	898.145
4	SLTP	1.373.919	1.294.483	1.274.417	1.131.214
5	SLTA Umum/SMU	2.280.029	1.950.626	1.910.829	1.930.320
6	SLTA Kejuruan/ SMK	1.569.690	1.520.549	1.621.402	1.731.743
7	Akademi/Diploma	251.541	219.736	242.937	220.932
8	Universitas	653.586	567.235	618.758	729.601
Total (Orang)		7.560.822	7.031.775	7.005.262	7.000.691

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Permasalahan pengangguran lainnya ditunjukkan pada Tabel 1.1 bahwa tingkat pendidikan yang mendominasi pengangguran terbuka di Indonesia yakni lulusan SLTA Umum sebesar 27,57 persen dan SLTA Kejuruan sebesar 24,74 persen pada Agustus 2018. Hal ini disebabkan karena informasi pasar kerja andal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja (Bappenas, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya perhatian peranan negara dalam mengurangi angka pengangguran minimal pada jenjang pendidikan yang wajib ditempuh oleh setiap warga negara.

Adanya bonus demografi dapat membawa dampak positif yakni dengan melimpahnya jumlah penduduk usia produktif dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Adapun dampak negatifnya yakni jika bonus demografi ini tidak dipersiapkan sebaik mungkin, maka akan berpotensi menimbulkan berlebihnya tenaga kerja dibandingkan dengan lapangan kerja yang disediakan, sehingga menyebabkan pengangguran yang dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan. Hal ini sebagaimana data pada Tabel 1.2 bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan kelompok usia 15-29 yang tergolong

usia pemuda memiliki persentase terbesar yakni 50,39 persen. Hal ini sebagaimana menurut Ryandono (2018) pada fakta dunia kerja menunjukkan bahwa pencari kerja atau pengangguran terbuka terbesar di Indonesia adalah pemuda sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2010-2018 (Persentase)**

Kelompok Umur	2015	2016	2017	2018
15-19	17.71	28.09	27.54	26.67
20-24	12.86	15.80	16.62	16.73
25-29	10.65	7.08	6.76	6.99
30-34	8.86	3.63	3.40	3.47
35-39	7.86	2.21	2.45	2.49
40-44	7.59	2.05	1.86	1.81
45-49	6.97	1.35	1.51	1.58
50-54	5.93	1.66	1.54	1.40
55-59	6.05	1.55	1.73	1.25
60 keatas	4.74	1.51	1.52	0.61

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Permasalahan pengangguran dalam perspektif Islam adalah kondisi dimana seseorang tidak mau memanfaatkan potensi raga dan rohaninya dalam mewujudkan suatu manfaat yang dibenarkan oleh Syariah. Adapun penyebab pengangguran terjadi atas dua faktor yaitu faktor individu dan sistem sosial-ekonomi. Faktor individu seperti kemalasan, cacat tubuh/udzur dan rendahnya pendidikan serta keterampilan, sedangkan faktor sosial-ekonomi seperti kesempatan kerja yang terbatas, dominasi pengembangan sektor ekonomi non-riil dan hal lainnya (Syamsuri, 2018:115). Oleh karena itu Islam mendorong agar umatnya menjemput rezeki dan karunia dari Allah SWT dengan bekerja sebagai bagian dari ibadah sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 105.

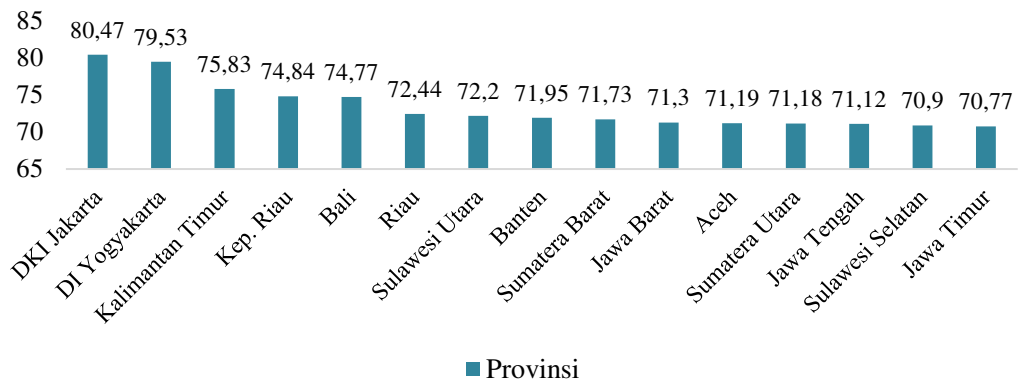
وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Wa quli'malu fa sayarallāhu 'amalakum wa rasuluhu wal-mu`minun, wa saturadduna ilā 'ālimil-gaibi wasy-syahādati fa yunabbi`ukum bimā kuntum ta'malun

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105)

Berdasarkan makna QS. At-Taubah: 105 bahwa pentingnya aktivitas bekerja yang dilakukan oleh seorang Muslim karena Allah, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin akan menjadi saksi atas apa yang telah diusahakannya selama di dunia. Di sisi lain pendekatan Islam dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu dengan melalui pendekatan secara individu dan sosial ekonomi. Pendekatan secara individu dapat dilakukan melalui pemberian akses terhadap pendidikan, keterampilan serta bantuan modal usaha. Adapun pendekatan secara sosial ekonomi dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah atau peran negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta memberikan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan dan keamanan (Syamsuri, 2018:118).

Selain itu salah satu alat ukur untuk menilai kualitas SDM di suatu negara tercermin dalam *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercermin dari beberapa indikator antara lain bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup, pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan pendapatan masyarakat. Pada dasarnya penduduk merupakan suatu aset besar yang dimiliki oleh suatu daerah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, ketika kualitasnya rendah maka akan menambah beban suatu daerah melalui meningkatnya tingkat kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan hal lainnya.



Gambar 1.3 Peringkat IPM Metode Baru Menurut Provinsi Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yaitu mencapai 112,913 juta jiwa atau sekitar 47,51 persen dari total penduduk di Indonesia. Di sisi lain walaupun jumlah penduduk pada tiga provinsi ini terhitung tinggi, namun jika melihat Gambar 1.3 bahwa ke-tiga provinsi yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dibanding provinsi lainnya ini pada tahun 2018 berada pada posisi ke-10 di bawah provinsi lain di Indonesia. Oleh karena itu, melihat fenomena ini maka pemerintah perlu meningkatkan kinerja pembangunan manusianya agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan manusia antar wilayah.

Berdasarkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang memberikan gambaran kapasitas pemuda sekaligus menunjukkan capaian pembangunan kepemudaan antara lain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Nilai IPP dalam rentang nilai 0-100, tingkat IPP pada tahun 2016 sebesar 50,17 sedangkan tahun 2015 nilai IPP sebesar 47,33. Peningkatan nilai IPP tahun 2016 menunjukkan adanya perbaikan hasil pembangunan kepemudaan. Meskipun demikian, peningkatan poin tersebut masih disertai dengan berbagai masalah

kepemudaan yang membutuhkan perhatian serius seperti pengangguran pemuda yang masih tinggi, sehingga membuat daya saing pemuda belum mencapai posisi yang optimal (BPS, 2018).

Dalam konsep ekonomi pembangunan Islam, dimensi ketauhidan, khalifah dan keadilan merupakan hal fundamental (Chapra, 1933:31). Fenomena ini dalam pendekatan konsep ekonomi pembangunan Islam sangat bergantung pada kualitas manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa serta sebagai esensi kemajuan bangsa tersebut. Dalam Islam, manusia memiliki dua tugas utama yaitu sebagai *'abdullah* (hamba Allah SWT) dan sebagai *khalifatullah fil ard* yaitu wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkannya. Selain itu, manusia dijadikan sebagai subjek dan inti dari pembangunan yang bersifat multi-dimensi serta memperhatikan aspek dari sisi fisik materil dan moral spiritual (Beik & Arsyianti, 2015:13-15).

Sehubungan dengan permasalahan ini maka Islam telah mengatur mekanismenya melalui instrumen keuangan publik Islam yaitu zakat yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-`āmilīna `alaihā wal-
mu`allafati qulūbuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-
sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu `alīmun ḥakīm.*

Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Berdasarkan QS. At-Taubah: 60 bahwa Allah telah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat, karena zakat bersumber dari harta yang jelas dan mempunyai sasaran yang jelas serta prinsip-prinsip zakat telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist. Selain itu menurut Beik (dikutip dalam *Indonesia Magnificence of Zakat*, 2011) bahwa zakat memiliki sejumlah fungsi dan dimensi penting baik spiritual personal, sosial, maupun dimensi ekonomi. Oleh karena itu menurut Effendi & Wirawan (2013) upaya pengentasan kemiskinan maupun pengangguran tersebut dapat melalui pengembangan kapasitas kelompok miskin melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian umat.

Konsep pemberdayaan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini menurut Ife yang telah dikutip oleh Adi (2002:50) bahwa pemberdayaan merupakan suatu sarana untuk memberikan orang sumber-sumber, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga mampu menentukan masa depannya dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan komunitasnya. Berdasarkan konsep pemberdayaan tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat lebih mengacu ada aspek manusia yang diperlukan pada peningkatan kapasitas (*Capacity Buiding*) melalui pendidikan, pelatihan dan pemberian keterampilan agar mampu memberikan keberdayaan pada masyarakat dhuafa khususnya para pemuda sebagai *agent of change*.

Di samping itu permasalahan pengangguran dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam, maka salah satu peranan zakat yaitu untuk mengembangkan sumber pendanaan pembangunan bagi kesejahteraan umat. Kesejahteraan dalam hal pemenuhan kebutuhan primer dalam jangka pendek, sementara untuk jangka

panjang dalam daya tahan dan kemandirian dapat meningkat. Selain itu, kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual seperti sholat, puasa, dan aspek spiritual lainnya. Dengan demikian keberadaan zakat dalam permasalahan ini menjadi salah satu pilar penting dalam *Religious Financial Sector* yang memiliki strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, serta stabilisasi sistem keuangan (BAZNAS, 2016).

Tabel 1.3 Potensi Zakat Terbesar dan Terkecil Menurut Provinsi

No	Keterangan	Nama Provinsi	Potensi Zakat
1	Provinsi dengan potensi Zakat tertinggi	Jawa Barat	Rp. 17, 67 triliun
		Jawa Timur	Rp. 15, 49 triliun
		Jawa Tengah	Rp. 13, 28 triliun
2	Provinsi dengan potensi Zakat terendah	Bali	Rp. 126, 25 miliar
		Papua	Rp. 117, 44 miliar
		Papua Barat	Rp. 111, 68 miliar

Sumber: BAZNAS dan FEM IPB (2011)

Berdasarkan Tabel 1.3 melihat potensi zakat di ketiga provinsi Pulau Jawa mencapai Rp. 46,44 triliun yang merupakan hasil penelitian BAZNAS Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan FE IPB. Selain itu dari sisi penyaluran, dimana variabel ini diukur dengan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) atau rasio alokasi penyaluran terhadap penghimpunan, baik yang bersifat sosial maupun produktif berdasarkan data BAZNAS (2017) menunjukkan data ACR Provinsi Jawa Barat sebesar 74,82 persen (*Effective*), Jawa Tengah sebesar 20,75 (*Below Expectation*) dan Jawa Timur sebesar 55,29 persen (*Fairly Effective*). Kategori *Fairly* dan *Below Effective* ini menunjukkan bahwa total dana zakat yang bisa disalurkan masih lebih sedikit dibandingkan dana zakat yang berhasil dihimpun (BAZNAS, 2018).

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa lembaga yang mengelola zakat di Indonesia terdapat dua yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Indonesia memiliki beberapa LAZNAS antara lain yaitu LAZ Al-Azhar sebagai lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu dalam hal pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat melalui program pemberdayaan. LAZ Al-Azhar mengembangkan beragam program pemberdayaan yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat. Selain itu LAZ Al-Azhar pada tahun 2018 meraih penghargaan dari BAZNAS untuk kategori program pendayagunaan dan kategori laporan tahunan terbaik.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LAZ Al-Azhar yaitu memberdayakan masyarakat usia produktif melalui optimalisasi pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama. Rumah Gemilang Indonesia (RGI) menjadi pusat pemberdayaan pemuda usia produktif kepada kaum dhuafa sebagai upaya menanggulangi pengangguran di Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan pelatihan non-formal dengan mengadopsi model Pesantren. Program RGI ini memadukan antara pengetahuan, keterampilan serta pemberian dasar akidah iman yang baik dan benar. Adapun sasaran yang dituju dari program RGI ini adalah kaum dhuafa, anak yatim dan pemuda yang putus sekolah maupun yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Di samping itu RGI lebih mendorong para alumninya untuk berwirausaha (*entrepreneurship*) yang tidak selalu harus bekerja sebagai karyawan. Hal ini karena basis ekonomi Islam adalah sektor riil, maka memiliki manusia yang memiliki karakter *entrepreneur* akan mampu menggerakkan sektor riil adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu maka, pentingnya peranan lembaga zakat dalam memberdayakan mustahik pemuda dalam usia produktif dengan pemberian pendidikan non-formal (pelatihan) dalam meningkatkan kualitas manusia yang berakhlakul karimah.

Berdasarkan *Sustainable Prosperity Plan* program RGI ini tergolong pada poin pengentasan pengangguran dan pemberdayaan pemuda usia produktif. Hal ini sejalan dengan salah satu poin *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu poin ke-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Adapun pada *Maqashid Syariah* berada dalam dimensi harta (*hifdzul maal*) serta berada pada tingkat kebutuhan *dharuriyah* (BAZNAS, 2017:19). Oleh karena itu, urgensi penelitian ini yaitu diperlukan adanya upaya dan pendekatan yang komprehensif dalam program pemberdayaan pemuda usia produktif salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan yang akan melahirkan generasi SDM yang unggul dan berkualitas dari sisi intelektualitas dan moralitas. Hal ini mengingat pentingnya lembaga zakat yang memiliki peran strategis dalam memanfaatkan dana zakat sebagai instrument dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Berkaitan dengan permasalahan ini, Baga dan Beik (2011) menyusun Tipologi kaum dhuafa yang didasarkan pada kemampuan dan kemauan berusaha dari mustahik tersebut yang dibagi menjadi empat tipe sebagai pendekatan dalam proses program pemberdayaan agar berjalan efektif. Hal ini dilatarbelakangi selain oleh faktor modal uang/ dana, namun faktor *personal capital* dan *social capital* merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan. *Personal capital* adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pribadi kaum dhuafa, seperti motivasi, *skill*, keinginan untuk berubah, pembelajar cepat dan lainnya. Adapun *social capital* adalah berkaitan dengan kondisi hubungan sosial para dhuafa antara satu dengan yang lainnya, seperti semangat persaudaraan dan hubungan kerja sama antar anggota masyarakat (Beik & Arsyianti, 2015:80).

Beberapa hasil studi empiris sebelumnya tentang faktor-faktor keberhasilan pemberdayaan mustahik telah dilakukan dengan kesimpulan penelitian yang berbeda. Hal tersebut sebagai *research gap* dalam penelitian ini untuk selanjutnya diuji kembali, sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang baru. Berdasarkan studi Baird & Wang (2008) bahwa yang mempengaruhi pemberdayaan antara lain Faktor Organisasi (*Organizational factors*) yang akan menunjang dalam mempersiapkan program pemberdayaan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan. Hal ini termasuk dukungan lembaga zakat (*Institutional Support*) dalam menunjang keberhasilan program pemberdayaan mustahik. Faktor dukungan lembaga sebagaimana menurut Hamzah (2017) termasuk faktor eksternal yang dapat berupa penyedia sarana prasarana, penyedia informasi, penyedia modal dan pemasaran hasil usaha.

Hasil studi empiris terkait dukungan lembaga zakat antara lain oleh Trianto dkk. (2019) bahwa dukungan organisasi lembaga zakat memiliki pengaruh tidak langsung yakni melalui motivasi mustahik terhadap keberhasilan program pemberdayaan. Hasil studi empiris lainnya ditemukan oleh Afzali dkk. (2014) bahwa dukungan organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberdayaan. Di samping itu dukungan kelembagaan yang akan menunjang keberhasilan program pemberdayaan mustahik antara lain lembaga zakat bisa memberikan bantuan modal usaha melalui akad *qardhul hasan* sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif. Hal ini sebagaimana hasil riset Muhammad dkk (2013) menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis Asnaf di Malaysia dipengaruhi dan memiliki korelasi positif dari modal serta pengetahuan yang diberikan lembaga zakat.

Salah satu paradigma pemberdayaan mustahik yaitu proses transformasi mustahik dalam menginternalisasi nilai-nilai baru yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan mustahik agar ke depannya mampu menjadi muzakki. Proses pemberdayaan ini harus disertai peranan pendamping yang mampu mendidik mustahik dalam mencapai keberhasilan program pemberdayaan. Pendamping bertugas untuk mengarahkan proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator (pemandu), komunikator (penghubung) maupun dinamisator (penggerak) (Widiastuti, 2013:115).

Keterkaitan pendampingan usaha dengan keberhasilan program pemberdayaan didasarkan pada hasil riset Tsalistia dkk. (2010) yang mengkaji program *Microfinance* Berbasis Syariah (MiSykat) sebagai program pemberdayaan mikro menyatakan bahwa dengan adanya pendampingan usaha dapat memperbaiki kesejahteraan mustahik baik dari sisi material dan spiritual. Hal ini sebagaimana

hasil riset Riyaldi (2015) bahwa salah satu faktor dalam keberhasilan mustahik yaitu adanya bimbingan dari staf lapangan. Fakta empiris lainnya terkait peranan pendamping (*Companion Role*) berdasarkan hasil riset Pailis dkk. (2016) dan Andrianti & Huda (2015) yang menyebutkan bahwa adanya pengaruh yang positif dari variabel pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik.

Berdasarkan studi Baird & Wang (2008) faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pemberdayaan yaitu Faktor Budaya (*Cultural factors*) yang akan mempengaruhi dan mendorong masyarakat untuk berperilaku dengan cara yang diinginkan. Dukungan lingkungan sosial keagamaan (*Religious Social Environment Support*) dalam riset Hamzah (2017) dijadikan sebagai salah satu variabel dalam mendukung pengembangan bisnis mustahik. Adapun indikator dukungan lingkungan sosial keagamaan yang dipakai oleh Hamzah (2017) antara lain dukungan keluarga, nilai budaya, peran keagamaan dalam keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis regresi Riyaldi & Sari (2018) menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti dukungan modal usaha, bantuan staf, dukungan keluarga dan dukungan teman memiliki efek positif dan signifikan pada penerima produktif ZIS.

Keberhasilan program pemberdayaan mustahik diharapkan mampu berperan terhadap perbaikan dan peningkatan kesejahteraan mustahik baik secara individu maupun sosial. Berdasarkan hasil empiris oleh Zaenal dkk. (2018) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui zakat secara ekonomi berdampak signifikan dalam menekan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Penelitian selanjutnya oleh Andrianti & Huda (2015) yang menguatkan hasil kajian riset sebelumnya bahwa dengan adanya program pendayagunaan zakat produktif melalui

program mentoring pemberdayaan secara signifikan berdampak pada kesejahteraan rumah tangga mustahik. Selain itu Pailis dkk. (2016) menyebutkan bahwa pemberdayaan mustahik akan mempengaruhi kesejahteraan individu (*individual welfare*) dan komunitas (*society welfare*).

Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif secara kuantitatif dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Penelitian ini akan dilakukan pada LAZ Al-Azhar melalui survei pada lulusan (alumni) program Rumah Gemilang Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan hasil kajian riset sebelumnya yaitu terletak pada indikator-indikator setiap capaian keberhasilan program pemberdayaan mustahik yang tidak hanya bersifat materil saja seperti pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) tetapi aspek spiritual (*value*) juga diperhitungkan. Hal ini sebagaimana tujuan program RGI yaitu menghasilkan para pemuda pemudi yang mandiri, berdaya, kreatif, siap bekerja serta unggul dalam iman dan taqwa.

Berdasarkan fenomena permasalahan yang dikaitkan dengan konsep dan teori serta hasil riset sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam mengukur variabel yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penelitian ini berjudul “Program Pemberdayaan Mustahik Pemuda dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan”. Harapannya dari hasil studi ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak terkait khususnya lembaga zakat agar dapat mengevaluasi program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif yang efektif dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari penelitian ini teruraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dukungan lembaga zakat terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda?
2. Apakah terdapat pengaruh peranan pendamping terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda?
3. Apakah terdapat pengaruh dukungan lingkungan sosial dan keagamaan terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda?
4. Apakah terdapat pengaruh keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda terhadap kesejahteraan individu?
5. Apakah terdapat pengaruh keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda terhadap kesejahteraan sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan mengukur faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda dengan memperhatikan aspek pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*) dan spiritual (*value*) serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik. Hal ini diharapkan akan menjadi evaluasi program pemberdayaan oleh lembaga zakat sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran dan tercapainya kesejahteraan yang berdimensi dunia dan akhirat (*falah*). Adapun secara spesifik, tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh dukungan lembaga zakat terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda.
2. Menganalisis pengaruh peranan pendamping terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda.
3. Menganalisis pengaruh dukungan lingkungan sosial dan keagamaan terhadap keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda.
4. Menganalisis pengaruh keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda terhadap kesejahteraan individu.
5. Menganalisis pengaruh keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda terhadap kesejahteraan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini terbagi kedalam empat hal yaitu bagi pengembangan teori, manfaat praktik, manfaat pemangku kebijakan (*stakeholder*) serta manfaat bagi penulis.

1. Manfaat Pengembangan Teori

Manfaat penelitian ini secara teoritis (keilmuan) adalah menambah khazanah keilmuan, konsep ilmiah, dan referensi terutama pada konteks ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam atau *Islamic Socio Economic Development*. Hal ini dilakukan karena pada umumnya dalam kajian ekonomi pembangunan konvensional, pembahasan masalah pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda usia produktif sering bersifat parsial, yakni kurang memperhatikan aspek spiritual atau rohani (*value/religious*). Selain itu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman baru terkait

faktor-faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan. Hal ini mengingat pentingnya pengukuran aspek material dan spiritual agar mampu mencerminkan konsep kesejahteraan dalam Islam.

2. Manfaat Praktik

Manfaat praktik untuk masyarakat secara luas adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi pemerintah dan institusi lembaga filantropi yang mengelola dana zakat. Manfaat khusus bagi lembaga zakat sebagai umpan balik (*feedback*) tentang pentingnya memperhatikan aspek atau faktor-faktor yang akan menentukan keberhasilan program pemberdayaan mustahik. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan kemiskinan maupun pengangguran serta untuk meningkatkan kualitas kehidupan mustahik baik dari sisi material maupun spiritual. Selanjutnya dapat menjadi rujukan implementasi model program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif terutama bagi lembaga – lembaga zakat lainnya.

3. Manfaat Pemangku Kebijakan (*Stakeholder*)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan semua yang terlibat dalam program pemberdayaan untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mengentaskan pengangguran melalui langkah-langkah yang konkret dan terintegrasi. Di sisi lain dengan memperhatikan aspek yang paling dibutuhkan oleh mustahik atau kaum dhuafa yaitu aspek mental, motivasi, dan nilai spiritual. Selain itu diperlukan jaringan kemitraan dari berbagai pihak untuk membuat suatu model pengembangan pemberdayaan masyarakat pada tujuan yang sama yaitu *Falah*.

4. Manfaat bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak khususnya bagi penulis selain sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan mendapatkan gelar strata dua dari Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, namun juga kebermanfaatannya yang luas dalam mengembangkan ide dan gagasannya serta membuktikan secara empiris dari konsep, teori serta mensitesakan hasil dari riset-riset sebelumnya agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang baru dan komprehensif terkait faktor penentu keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan.

1.5 Lingkup Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka perlu untuk menetapkan lingkup penelitian sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat menjadi lebih fokus. Adapun lingkup penelitian pada tesis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Isu terpenting dalam penelitian ini adalah permasalahan pengangguran pemuda usia produktif, sehingga akan memberikan gambaran terkait faktor-faktor keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif serta dampaknya terhadap kesejahteraan.
2. Penelitian ini didasari oleh konsep dan peranan zakat sebagai salah satu instrumen dana keuangan publik Islam yang dikelola dan dioptimalisasikan manfaatnya oleh lembaga zakat melalui program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Data yang digunakan merupakan data primer dengan kuesioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) kepada mustahik alumni LAZ Al-Azhar pada program Rumah Gemilang Indonesia (RGI).

3.1 Sistematika Tesis

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah penelitian, urgensi penelitian, menentukan rumusan masalah, menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tesis.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti untuk menghubungkan permasalahan dalam penelitian. Bab ini akan menampilkan beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan kajian teori tentang konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam, kedudukan zakat dalam Islam, konsep lembaga zakat. Selain itu, dalam bab ini akan membahas konsep dasar pemberdayaan mustahik, konsep pemberdayaan pemuda (*youth empowerment*), konsep dasar pendampingan mustahik serta faktor-faktor keberhasilan pemberdayaan mustahik.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor keberhasilan program pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Selain itu, pada bab ini akan diuraikan jenis dan sumber data

yang berasal dari buku, kajian, jurnal, data, dan sumber lain sejenis serta kriteria pemilihan sumber data tersebut. Bab ini juga meliputi identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengumpulan data dan analisis dari data-data yang digunakan.

Bab 4 Pembahasan Hasil

Pada bab ini, peneliti akan memberikan deskripsi terkait objek penelitian, analisis karakteristik responden, analisis variabel penelitian serta menganalisis hasil dari hipotesis dengan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) yang terdiri dari pengujian model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Pengujian hasil empiris model ini akan dibahas dengan telaah konsep, teori serta mensitesakan temuan hasil riset-riset sebelumnya.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan serta memberikan justifikasi lebih terhadap perancangan model yang dibuat. Bab ini akan memberikan rekomendasi terkait kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah, lembaga zakat dan *stakeholder* terkait lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pemuda dari kalangan dhuafa. Bab ini akan memberikan beberapa fokus studi untuk memperkaya kajian tentang faktor keberhasilan pemberdayaan mustahik pemuda usia produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan dalam penelitian yang lain.